

## PERANAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNANDI DESA BINALANG

**Hendry Rumengan**

Universitas Teknologi Sulawesi Utara  
*E-mail* : [hendry.rumengan@gmail.com](mailto:hendry.rumengan@gmail.com)

***ABSTRACT.** A role is a set of behaviors expected of a person according to his social position. Roles are based on rules and expectations because it is the role that explains what individuals must do in a given situation in order to meet their own expectations or the expectations of others. The purpose of this research is to know the role of Village Community Empowerment Institution in Binalang Village, and this research uses qualitative research method. Instrument researchers are researchers themselves. From the results of this study concluded that the role of LPMD in Binalang Village is not optimal, this is seen from the low ability of LPMD to increase community participation and lack of ability to plan development. To overcome the problems related to the low role of the Community Empowerment Institution, it is necessary to train the quality improvement program of human resources for LPMD management in the form of providing training with orientation to the main task and function of LPMD itself.*

***Keywords:** Role of LPMD, Participation, and Development*

**ABSTRAK.** Peranan adalah seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang sesuai dengan posisi sosialnya. Peran didasarkan pada aturan dan harapan karena peranlah yang menjelaskan apa yang harus dilakukan individu dalam situasi tertentu untuk memenuhi harapan mereka sendiri atau harapan orang lain. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Binalang, dan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Peneliti instrumen adalah peneliti itu sendiri. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran LPMD di Desa Binalang belum optimal hal ini terlihat dari rendahnya kemampuan LPMD dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan kurangnya kemampuan merencanakan pembangunan. Untuk mengatasi permasalahan terkait rendahnya peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, maka perlu dilakukan pelatihan program peningkatan kualitas SDM pengelola LPMD berupa pemberian pelatihan yang berorientasi pada tugas pokok dan fungsi LPMD itu sendiri.

**Kata kunci:** Peran LPMD, Partisipasi, dan Pengembangan.

### PENDAHULUAN

Pemerintahan yang baik (*good government*) merupakan topik pembicaraan yang paling utama dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Banyak tuntutan yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik,

semua itu karena meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat. Pola-pola lama penyelenggaraan pemerintahan tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang telah berubah. Oleh karena itu tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan sudah seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan yang terarah demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. LPMD merupakan mitra kerja pemerintah dalam merancang pembangunan yang partisipatif. Karena peranannya sebagai mitra pemerintah maka LPMD harus dapat mewujudkan peran dan fungsinya sebagai lembaga sosial kemasyarakatan, melalui kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa. Di dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang desa, menyatakan bahwa tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yakni: (1) melakukan pemberdayaan masyarakat pedesaan, (2) menumbuhkan persatuan dan kesatuan masyarakat untuk bekerja sama, (3) melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di dalam desa, dan (4) meningkatkan pelayanan bagi masyarakat desa. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) adalah Lembaga Kemasyarakatan yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat, merupakan wahana partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, meningkatkan partisipasi masyarakat, meningkatkan kemampuan masyarakat sebagai sumber daya manusia (SDM) untuk mengelola sumber daya alam (SDA), meningkatkan ekonomi kerakyatan dan upaya pengentasan kemiskinan. Berbeda dengan kenyataan yang sedang terjadi di Desa Binalang Kecamatan Tampan'amma Kabupaten Kepulauan Talaud, sejauh ini peranan LPMD sebagai mitra kerja dari kepala desa belum dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Karena pada kenyataannya dalam hal peningkatan kesadaran akan pentingnya partisipasi masyarakat, perencanaan dalam pembangunan desa masih saja ditangani oleh kepala desa walaupun memang itu juga yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari kepala desa namun jika dalam suatu desa LPMD sudah terbentuk maka hal ini akan menjadi tanggung jawab dari LPMD itu sendiri. Adapun karena kondisi masyarakat yang kurang mampu dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, yang membuat mereka untuk lebih memilih melakukan aktifitas rutin mereka seperti berkebun atau melaut untuk mencari ikan, agar kebutuhan hidup mereka terpenuhi dari pada mengikuti program-program pembangunan yang ada di desa. Hal inilah yang membuat masyarakat desa Binalang jarang untuk berpartisipasi atau terlibat langsung dalam program-program pembangunan. Rendahnya partisipasi masyarakat di desa Binalang juga di pengaruhi oleh kurangnya peran dari Lembaga

Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD). Hal itu dilihat dari kurangnya komunikasi dan kegiatan-kegiatan dari pihak LPMD terhadap masyarakat mengenai pentingnya keterlibatan langsung masyarakat desa dalam perumusan masalah-masalah utama yang harus di atasi, karena partisipasi masyarakat bukan saja hanya pada proses pelaksanaan pembangunan, tetapi peranan partisipasi masyarakat dimulai sejak poses perencanaan pembangunan sampai pada proses pengawasan dari hasil pembangunan yang telah dilakukan.

### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan observasi awal dari peneliti bahwa ternyata keberadaan dari LPMD ditengah-tengah masyarakat Desa Binalang belum terlalu memberikan dampak yang baik terhadap masyarakat. dampak yang baik dalam hal ini yaitu tumbuhnya tingkat kesadaran dari masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan desa, atau timbulnya keinginan-keinginan untuk memberikan aspirasi kepada pemerintah mengenai apa yang menjadi kebutuhan utama yang harus diprioritaskan dalam pembangunan tersebut. Semua itu belum terjadi karena dari pihak LPMD sendiri, dalam hal pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masih belum berjalan dengan baik. Walaupun LPMD sudah ada ditengah-tengah masyarakat Desa Binalang, tetapi masih saja terdapat kebijakan-kebijakan pembangunan yang diaplikasikan oleh pemerintah daerah selama ini yang terkadang tidak mengenai langsung pada kepentingan masyarakat. kondisi tersebut dapat dilihat dari banyaknya proyek atau program-program diberbagai sektor yang masuk ke desa dan telah didukung oleh anggaran yang cukup besar, kenyataannya hanya mampu menjadikan masyarakat desa sebagai penerima pasif tanpa ada keterlibatan secara aktif, atau yang lebih dikenal dengan pembangunan yang bersifat *top down*. Akhirnya, karena rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam tahap-tahap pembangunan yang ada, maka timbullah sebuah kesan pembangunan yang tidak tepat sasaran terhadap kebutuhan masyarakat. berbagai macam program pembangunan yang telah diaplikasikan terlihat tidak terawat, jarang difungsikan, bahkan tidak bertahan lama, dikarenakan minimnya rasamemiliki atau rendahnya perhatian masyarakat yang ada disekitar program yang telah diaplikasikan itu. Oleh karena itu berdasarkan latar belakang dan kondisi di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan karya ilmiah dengan judul **“Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Desa, di Desa Binalang Kecamatan Tampan’amma Kabupaten Kepulauan Talaud”**.

## TINJAUAN PUSTAKA

Peranan berasal dari kata “*peran*” yang berarti aspek dinamis dari kedudukan atau status (Soekanto 2009). Di dalam kehidupan sehari-hari, seseorang yang melaksanakan hak dan kewajiban berarti telah menjalankan suatu peran. Di dalam peranan terdapat dua macam harapan, yaitu: pertama, harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran (pemimpin), atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, dan kedua, harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya. Peranan adalah suatu perbuatan seseorang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya, dan seseorang dapat dikatakan berperan jika ia telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dalam masyarakat. (Abdulsyani 2012). Berdasarkan pengertian peran dan peranan di atas dapat disimpulkan bahwa peranan adalah suatu tindakan atau aktivitas yang diharapkan oleh masyarakat atau pihak lain untuk dilakukan oleh seseorang sesuai dengan status yang mereka miliki sehingga peran atau peranan tersebut dapat dirasakan pengaruhnya dalam lingkup kehidupan. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), pada awalnya disebut Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Dalam *UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 211 ayat 1 dan 2, tentang Pemerintahan Daerah* pada pasal tersebut dikatakan bahwa ayat 1 “*di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan peraturan desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan*”, sedangkan pada ayat 2 berbunyi: “*lembaga kemasyarakatan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa*”. Menurut Isbandi (2007), “partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah. Dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi”. “partisipasi merupakan ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan dan ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan, Suryono (2001)”. H.A.R Tilaar (2009) mengungkapkan bahwa partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (*bottom up*) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya. Pembangunan desa merupakan upaya

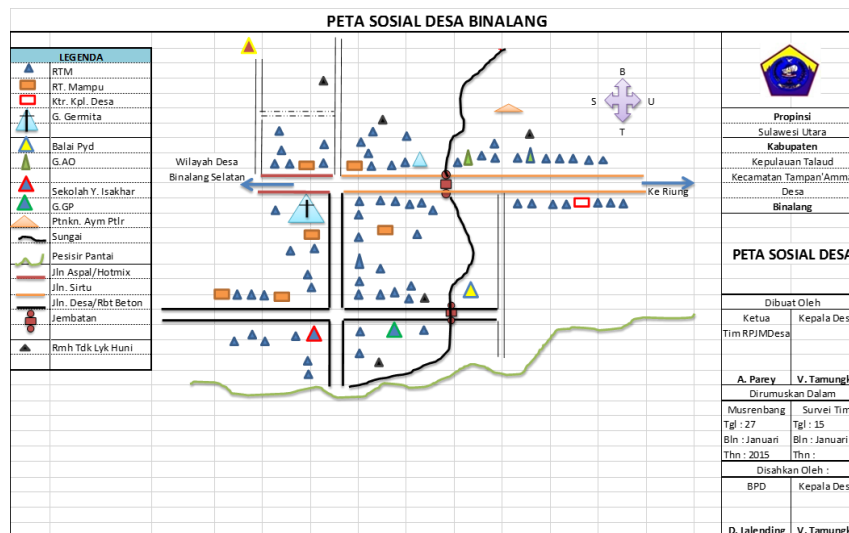
pemerintah dan masyarakat desa untuk memajukan, mengembangkan, dan meningkatkan semua aspek kehidupan desanya dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi sebuah desa. Menurut *S.P. Siagian, (2006)* pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian kegiatan usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana dan dilaksanakan secara sadar oleh suatu bangsa dan Negara serta pemerintahan dalam rangka pembinaan bangsa. *Suryono (2001)*, menjelaskan bahwa tujuan pembangunan pedesaan ada dua tahap, *pertama* pada hakikatnya pembangunan bertujuan untuk menghapus kemiskinan. Apabila tujuan ini sudah mulai dirasakan hasilnya, maka tahap *kedua* adalah menciptakan kesempatan-kesempatan bagi warganya untuk dapat hidup bahagia dan terpenuhi segala kebutuhannya.

### **Metodologi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Binalang Kecamatan Tampan'amma Kabupaten Kepulauan Talaud. Dalam penelitian ini pihak yang menjadi sumber data (informan) adalah mereka yang dianggap mempunyai informasi yang dibutuhkan oleh peneliti di wilayah penelitian. Dan untuk menentukan informan kunci tersebut maka peneliti menggunakan "*purposive sampling*" (sampel bertujuan), atau teknik pengambilan sampel secara sengaja maksudnya peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil karena ada pertimbangan tertentu. Jadi sampel diambil tidak secara acak, tapi ditentukan sendiri oleh peneliti. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data (informan) adalah masyarakat Desa Binalang, tokoh adat, tokoh agama, dan pemerintah. Pemerintah dalam hal ini yaitu Kepala Desa dan Pengurus LPMD. Karena mereka adalah yang dianggap memiliki informasi-informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai *sumber*, dan berbagai *cara*. Bila dilihat dari *setting*-nya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah (*natural setting*), dan dari sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, sedangkan teknik (cara) yang digunakan dalam pengumpulan data ini yaitu dengan cara : 1) Observasi (Pengamatan Lapangan). 2) Wawancara. 3) Studi Dokumentasi.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Peta Desa Binalang



### Sumber Data : Kantor Desa Binalang

Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah memajukan dan memandirikan masyarakat dari kemiskinan dan keterbelakangan. Kemiskinan masyarakat itu sendiri dapat dilihat dari indikator pemenuhan kebutuhan dasar yang belum mencukupi. Kebutuhan dasar itu mencakup tempat tinggal, makanan, pakaian, pendidikan dan kesehatan. Sedangkan keterbelakangan misalnya produktivitas yang rendah, sumberdaya manusia yang lemah. Sedangkan Tujuan pembentukan suatu lembaga kemasyarakatan yaitu untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai gotong royong dan kekeluargaan yang merupakan sendi-sendi utama dalam kehidupan bermasyarakat, dan juga merupakan suatu wadah yang berfungsi untuk memberdayakan masyarakat. Sebagai lembaga yang menjadi mitra kerja pemerintah desa dalam pembangunan, sebenarnya LPMD dapat berperan dalam proses perencanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di desa. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya LPMD seharusnya dapat memberikan masukan-masukan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan program maupun terlibat langsung dalam penyusunan program, baik itu sumber dananya dari pemerintah maupun dana dari hasil swadaya murni masyarakat. Beberapa pernyataan yang berkaitan dengan peran LPMD dalam melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan dapat di kemukakan sebagai berikut : wawancara di rumah informan yang adalah anggota LPMD dengan pertanyaan sebagai berikut : Sejauhmana

keterlibatan LPMD dalam perencanaan kegiatan pembangunan di desa binalang ? adapun jawaban yang diberikan adalah sebagai berikut : *“keterlibatan kami sebagai pengurus LPMD dalam proses penyusunan rencana pembangunan desa masih sangat kurang. Kami hanya sekedar ikut sebagai peserta dalam setiap rapat yang diadakan untuk menyusun rencana kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan. Saya ikut pertemuan kalau diberitahu atau diundang “.(wawancara dengan anggota LPMD, EB. 38 tahun.).* Agak berbeda dengan informasi dari informan di atas, dengan pertanyaan yang sama informan selanjutnya yang adalah ketua LPMD di Desa Binalang dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa :*“LPMD pernah terlibat secara aktif dalam menyusun rencana kegiatan yang dilaksanakan tepatnya pada tahun 2013 yaitu pembuatan drainase (penyaluran air diatas permukaan tanah). Keterlibatan LPMD dalam program ini yaitu LPMD bersama-sama dengan Pemerintah Desa merumuskan jenis kegiatan, anggaran biaya yang dibutuhkan dan hal lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan. Tetapi untuk program-program yang lainnya kedudukan pengurus LPMD sama dengan anggota masyarakat lainnya, yang akan ikut dalam kegiatan yang dilaksanakan jika diundang oleh pelaksana “.* (wawancara dengan ketua LPMD, SL.40 tahun). Sementara itu Kepala Desa Binalang, ketika diwawancarai oleh peneliti dengan pertanyaan sebagai berikut : Apakah LPMD pernah memberikan usulan rencana kegiatan mengenai pembangunan di desa ? dengan pertanyaan tersebut informan mengatakan bahwa : *“Pernah beberapa tahun yang lalu tepatnya tahun 2013, pada waktu itu, saat musim hujan ada genangan air di sekitar pemukiman warga yang dari genangan air itu mulai menimbulkan bau tak sedap dan sudah menjadi sarang nyamuk yang bisa berakibat buruk bila dibiarkan. Sehingga Pemerintah Desa bersama-sama dengan LPMD mengadakan rapat untuk pembuatan drainase yang dibahas Bersama-sama dengan masyarakat.(wawancara dengan Kepala Desa Binalang, VT.39 tahun).* Sedangkan informan yang selanjutnya yang merupakan anggota masyarakat di Desa Binalang, ketika diwawancarai oleh peneliti dengan pertanyaan sebagai berikut : Apakah pemerintah desa dan LPMD selalu melibatkan masyarakat di dalam perencanaan kegiatan pembangunan di desa ? adapun jawaban yang diberikan oleh informan adalah : *“Ya, kami biasanya di undang oleh Kepala Desa untuk ikut dalam rapat yang membicarakan rencana kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan. Kepala Desa biasanya melakukan undangan rapat melalui alat pembesar suara (TOA) dari kantor kepala desa, atau melalui perangkat desa dalam hal ini adalah para Kepala Dusun yang datang ke rumah masyarakat. Kalau LPMD jarang mengundang masyarakat untuk mengikuti rapat”.*(wawancara dengan anggota masyarakat, AT.45 tahun). Dalam hal penyampaian pendapat dalam pertemuan, partisipasi pengurus LPMD masih sangat rendah. Hal ini dapat

dilihat dari pernyataan seorang informan, yang merupakan masyarakat yang ada di Desa Binalang ketika diwawancarai dengan pertanyaan : Bagaimanaperan LPMD dalam sebuah rapat, apakah selalu memberikan masukan atau saran mengenai program pembangunan yang harus diprioritaskan atau tida ? untuk menyimak pertanyaan yang diberikan oleh peneliti maka informan pun memberikan jawaban sebagai berikut : *“Dalam pertemuan atau rapat, yang lebih banyak mengemukakan pendapat adalah kepala desa. Kami masyarakat walaupun sudah dibuka kesempatan untuk berdiskusi lebih banyak hanya mendengarkan saja apa yang disampaikan oleh kepala desa,.Masyarakat masih menganggap bahwa yang lebih mengetahui berbagai permasalahan di desa adalah kepala desa”*. (wawancara dengan anggota masyarakat, NR.45.tahun). Dari beberapa pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam penyusunan rencana kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di desa, inisiatifnya lebih banyak berasal dari kepala desa. Demikian pula dalam hal penyampaian gagasan dalam pertemuan- pertemuan yang dilaksanakan masih didominasi oleh pemerintah desa. Komponen kedua yang berkaitan dengan peran LPMD adalah kemampuan dalam menggerakkan partisipasi masyarakat. Keterlibatan LPMD dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dapat dilihat dari keterlibatan dalam menggerakkan masyarakat dan kesediaan dalam mengumpulkan dana. Dalam hal keterlibatan LPMD untuk menggerakkan masyarakat terdapat dua pendapat. Pendapat pertama menyebutkan bahwa LPMD tidak terlibat dalam pengarahan masyarakat dan kedua yang mengatakan bahwa LPMD terlibat dalam pengarahan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Seorang Informan yang merupakan anggota LPMD dalam kesempatan wawancara, dengan pertanyaan sebagai berikut : Apakah pemerintah desa selalu melibatkan LPMD dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut dalam kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan ? informan pun mengatakan bahwa : *“Ya, Kami pengurus LPMD akan ikut memberitahukan pada masyarakat agar dapat mengikuti setiap kegiatan yang akan dilaksanakan jika sebelumnya kepala desa memberitahukan kepada kami untuk ikut menggerakkan masyarakat. Tetapi jika tidak ada pemberitahuan kepada kami, maka kami akan ikut dalam kegiatan itu sama seperti warga lainnya. Kalau kami kurang berperan dalam menggerakkan partisipasi masyarakat, maka pemerintah desa salah yang memberdayakan masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam pembangunan ”*. (wawancara dengan anggota LPMD, EB.38 tahun. ) Selanjutnya dengan pertanyaan yang sama ketua LPMD dalam wawancara dengan peneliti, mengatakan bahwa : *“Ya, tetapi LPMD ikut menggerakkan masyarakat agar mengikuti setiap kegiatan yang akan dilaksanakan ataupun yang sementara dilaksanakan, baik itu ada pemberitahuan maupun tidak ada pemberitahuan dari pemerintah desa”*. (wawancara dengan ketua LPMD, SL. 40



tahun.). Berdasarkan informasi yang peneliti peroleh dari wawancara dengan informan tersebut, terjadi kontroversi yang mengatakan bahwa dari pihak LPMD turut menggerakkan partisipasi masyarakat, tetapi tanggapan dari masyarakat kebalikan dari pernyataan yang disampaikan oleh pengurus LPMD, untuk mengklarifikasi data yang diperoleh, peneliti mewawancarai kepala desa binalang mengenai hal keterlibatan LPMD untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dengan pertanyaan : Apakah selama ini LPMD terlibat dalam peningkatan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan ? menanggapi pertanyaan tersebut kepala desa mengatakan bahwa : *“Harus diakui bahwa selama saya menjabat sebagai kepala desa hampir 6 tahun ini, peran LPMD sangat kurang, keterlibatan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat juga belum terlalu nampak, Karena selama ini apabila ada kegiatan-kegiatan kerja bakti, seperti kerja bakti setiap hari jumat, merupakan program pemerintah, hanya pemerintah desa yang mengajak dan menghimbau masyarakat agar dapat bersama-sama dengan pemerintah desa untuk kerja bakti”*. (wawancara dengan Kepala Desa Binalang, VT.39 tahun). Ternyata penjelasan melalui informasi yang peneliti peroleh dari kepala desa sangat jelas mengatakan bahwa keterlibatan LPMD untuk menggerakkan masyarakat masih sangat kurang, hal ini saya selaku peneliti coba untuk konfirmasi dengan pengurus LPMD khususnya ketua LPMD yang sebelumnya memberikan informasi bahwa LPMD turut terlibat untuk menggerakkan partisipasi masyarakat, dengan pertanyaan berikut : Sejauhmana keterlibatan LPMD untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan ? sehingga ditemukan informasi bahwa : *“Keterlibatan LPMD untuk menggerakkan partisipasi masyarakat memang masih belum optimal, hanya beberapa kali saja pada saat LPMD baru dibentuk pada waktu itu terasa sekali semangatnya, tetapi lama-kelamaan sudah mulai hilang, bahkan tidak nampak sama sekali seperti saat ini”*. (wawancara dengan Ketua LPMD, SL.40 tahun) Menanggapi hal tersebut, ternyata ada pengakuan dari pengurus LPMD dalam hal ini ketua LPMD bahwa peran untuk menggerakkan masyarakat sudah mulai hilang.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil dari penelitian mengenai Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan Desa di Desa Binalang Kecamatan Tampan'amma Kabupaten Kepulauan Talaud, maka dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian sebagai berikut : 1). Sebagai mitra kerja dari pemerintah desa dalam memajukan pembangunan desa dan melakukan pemberdayaan kepada masyarakat Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Binalang ternyata belum optimal, hal ini dapat dinilai dari rendahnya kemampuan Lembaga

Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam merencanakan pembangunan, rendahnya kemampuan Lembaga pemberdayaan mengikuti kegiatan yang dilakukan di desa, yang menjadi kendalanya yaitu tidak tersedianya dana bagi kami, sehingga hal inilah yang menjadi pengaruh terhadap semangat kerjakami untuk ikut membantu pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat di desa binalang”.(wawancara dengan Ketua LPMD, SL.40 tahun. Tanggal). Senada dengan pernyataan diatas seorang anggota LPMD ketika diwawancarai dengan pertanyaan yang sama memberikan informasi sebagai berikut :“Kurangya kemampuan bagi kami untuk menentukan kegiatan-kegiatan apa yang harus dilakukan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, karna sejauh ini pemerintah desa, kecamatan dan kabupaten belum pernah memberikan pelatihan bagi kami selaku pengurus LPMD dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kami” (wawancara dengan anggota LPMD, EB.39 tahun). Dari hasil wawancara diatas dan berdasarkan analisis dari peneliti bahwa dalam hal meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan peranan dari LPMD masih sangat rendah. Dan adapun yang menjadi kelemahan dari LPMD dalam melaksanakan perannya lebih didasarkan pada hal klasik seperti kurangnya pengetahuan dari pengurus LPMD dan tidak tersediannya dana bagi pengurus LPMD, sehingga hal ini juga memberikan dampak yang buruk bagi keaktifan dari pengurus yang ada. Masyarakat Desa (LPMD) dalam menggerakkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat, serta rendahnya kemampuan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) untuk melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pembangunan yang ada di Desa Binalang. 2).Rendahya Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) di Desa Binalang ini disebabkan oleh kurangnya keaktifan dari para pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) untuk ikut dalam kegiatan pembangunan desa dan kegiatan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, ditambah dengan rendahnya pengetahuan, keterampilan, keahlian yang sesuai dengan tugas atau pekerjaan yang diembannya, hubungan kerja antara Pemerintah Desa dengan LPMD belum terjalin dengan baik. Adapun yang menjadi faktor penghambat yang sangat berpengaruh bagi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) yaitu tidak tersedianya dana operasional bagi LPMD.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo M.ec. Pembangunan Pedesaan: *pendekatan partisipatif, tipologi, strategi, konsep desa pusat pertumbuhan*. Cetakan kedua.  
Basrowi dan suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008. Dilla Sumadi, 2007, *komunikasi pembangunan*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung

Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat; kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Bandung: PT Reflika Aditama, 2009.

Effendi Bachtiar. 2002. Hal Utama dalam Pembangunan, Yogyakarta: Andi Offset

Hamidjojo, Santoso S. 1988. *Partisipasi, komunikasi, persuasi dan disiplin dalam pembangunannasional*. Bandung: alumni.

Handayani, Suci. 2006. Perlibatan Masyarakat Marginal Dalam Perencanaan dan PenganggaranPartisipasi (cetakan pertama). Surakarta: Kompip Solo

Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: SulembaHumanika, 2010.

Isbandi, R.A. 2007. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari pemikiran menjupenerapan*. Depok: FISIP UI Press.

Kaho, Josef Riwu. 2007. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada

Mikkelsen, Britha. 2006. Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Milaer, MB & Huberman AM, 1992, *Analisis data kualitatif*, Terjemahan Rohidi dan Mulyarto, UI Percetakan, Jakarta.

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Sad Dian Utomo. 2003. Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Kebijakan Pembangunan, Jakarta: Yayasan Harkat Bangsa.

Santoso Purwo dkk, 2003, *Pembaharuan Desa Secara Partisipatif*, Pustaka pelajar, Yogyakarta. Soetrisno. Lukaman. (1995). Menuju Masyarakat Partisipatif. Yogyakarta. Kanisius

#### SUMBER-SUMBER LAIN

Suryono, Agus. 2001. Teori dan isi pembangunan. Malang: Universitas Negeri Malang. UM Perss Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah

Usman Sunyoto, 1998, *pembangunan dan pemberdayaan masyarakat*, Pustaka pelajar, Yogyakarta.

<http://www.slideshare.net/mobile/abieyanka/lembaga-pemberdayaan-masyarakat-desa-lpmd-22215008>